



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 19 September 2008

Halaman: 1

**Guru PNS  
Tak Dapat THR**

**JOGJA** -- Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Sebab mereka sudah memperoleh gaji ke-13.

Namun khusus untuk 700-an guru PNS dari Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DIY, Dinas Pendidikan Propinsi menyalurkan tunjangan beban kerja yang mulai diberikan pada Kamis (18/9). Tunjangan itu berasal dari APBD Propinsi yang masuk lewat anggaran di Biro Kepegawaian Daerah (BKD).

"Tapi tunjangan ini bukan THR karena diberikan dua kali dalam satu tahun. Namun karena momennya pencairannya dekat Lebaran ya seperti THR," papar Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Didik Wardaya kepada *Bernas Jogja*, Kamis (18/9).

Besarnya tunjangan yang diberikan, menurut Didik Rp 900.000 per guru untuk tahap pertama. Namun karena dipotong untuk PPH, maka tunjangan yang diterima menjadi Rp. 765.000 per guru.

Untuk pengambilan tunjangan tersebut, guru diharuskan datang langsung ke Dinas Pendidikan Propinsi. Sebab memang dinas tersebut yang mengurus penyaluran gaji dan tunjangan para guru SLB selama ini.

Sementara untuk tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (GTT) di lingkungan dinas pendidikan, kewenangannya diserahkan pada dinas pendidikan kabupaten/kota.

THR untuk GTT/PTT di wilayah Kota Jogja akan diberikan setelah Lebaran. Besaran THR tersebut yakni

>> KE HAL 10

**Guru PNS Tak Dapat THR**

*Sambungan dari halaman 1*

Rp 100.000 dan rencananya akan diberikan sekitar sepuluh hari pascালেbaran bagi 3.214 GTT dan 1.751 PTT.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Drs Syamsury MM, THR tersebut hanya akan diberikan kepada para GTT/PTT yang telah mengantongi SK Walikota Jogja. Sementara itu, THR untuk GTT/PTT yang belum memilikinya akan diserahkan pada masing-masing sekolah.

"THR hanya akan diberikan bagi GTT/PTT yang sudah memiliki SK Walikota, bagi yang belum diserahkan pada masing-masing sekolah. Kami juga tidak memberikan aturan batasan minimal besaran THR yang harus diberikan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah," terang Syamsury kepada *Bernas Jogja*, Kamis (18/9).

Terpisah, Kepala SMA Muhammadiyah 2 (Muha) Jogja Drs HM Mahfudz MA mengungkapkan, saat ini sekolah tersebut memiliki sekitar 40 guru dan 30 karyawan. Dari jumlah tersebut, menurutnya, tak satupun yang memiliki SK dari Walikota Jogja. SK Pengawasan yang mereka miliki merupakan SK yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Terkait masalah THR, menurut Mahfudz, besaran THR bagi para guru dan karyawan di sekolah tersebut akan berbeda tergantung masa kerja dan profesi atau jabatan.

"Tapi prioritasnya tetap pada masa kerja, hal ini kami lakukan untuk memberikan penghargaan pada mereka. Rencananya, THR tersebut akan kami bagikan bersamaan dengan acara buka bersama tanggal 24 September mendatang," terang Mahfudz. (ptu/ovi)

Ditah  
Tem

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

INSTANSI	NILAI BERITA
1. ....	<input type="checkbox"/> Negatif
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif
3. <i>Din. Pendidikan</i>	
4. ....	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kantor Peng. Taman Pintar			

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005